

DARI GAGASAN KE AKSI: IMPLEMENTASI GREEN DEMOCRACY DI INDONESIA

Green Parliament, Green Village,
Diplomasi Iklim :
Sebuah Perspektif dari Bahar Buasan



Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc

Hak Cipta © 2026 Kontika Research and Innovation

DARI GAGASAN KE AKSI: IMPLEMENTASI GREEN DEMOCRACY DI INDONESIA

Green Parliament, Green Village,
Diplomasi Iklim :
Sebuah Perspektif dari Bahar Buasan

Acuan: Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI, meluncurkan buku berjudul "Green Democracy", yang menekankan keseimbangan antara demokrasi dan ekologi untuk masa depan, melambangkan harapan dan kemakmuran dengan fokus pada alam dan manusia. Buku ini diluncurkan sekitar September/Oktober 2024, dan bisa diakses melalui media sosialnya (IG: @sbnajamudin)

Penulis:

Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc
www.baharbuasan.id

Penerbit:

Kontika Research and Innovation
Jakarta, Indonesia
Tahun Terbit : 2026

Seluruh isi dalam publikasi ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

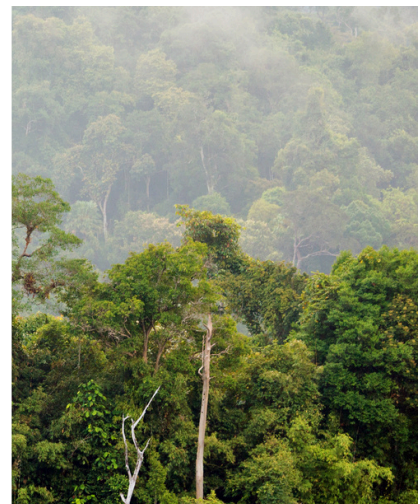
1

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi paradoks pembangunan yang semakin nyata: pertumbuhan ekonomi yang dikejar justru menggerus fondasi ekologi yang menjadi penopang kehidupan. Data menunjukkan bahwa 70% kebijakan terkait iklim di tingkat global gagal mencapai targetnya, sebuah angka yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola lingkungan.¹

Kegagalan ini bukan sekadar kegagalan teknis atau administratif, melainkan cermin dari kegagalan demokrasi itu sendiri. Sistem politik yang ada telah terjebak dalam logika jangka pendek—siklus pemilu lima tahunan yang mendorong pemimpin untuk mengambil kebijakan populis daripada berkelanjutan. Biaya politik yang tinggi memaksa kandidat bergantung pada donatur dari sektor ekstraktif, menciptakan konflik kepentingan yang sistemik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan ekologi jangka panjang.²

Dalam konteks inilah, gagasan Green Democracy muncul sebagai tawaran paradigma baru. Bukan sekadar menambahkan kata "hijau" pada praktik demokrasi yang ada, melainkan transformasi fundamental dalam cara kita memahami hubungan antara manusia, negara, dan alam. Green Democracy mengusulkan bahwa demokrasi yang sejati tidak bisa berdiri di atas fondasi eksploitasi alam, dan sebaliknya, pelestarian lingkungan membutuhkan sistem politik yang benar-benar partisipatif dan akuntabel.



¹ UNEP. (2023). Emissions Gap Report 2023: Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/emissions-gap-report-2023>

² Transparency International. (2023). Global Corruption Report: Climate Change. Berlin: Transparency International.

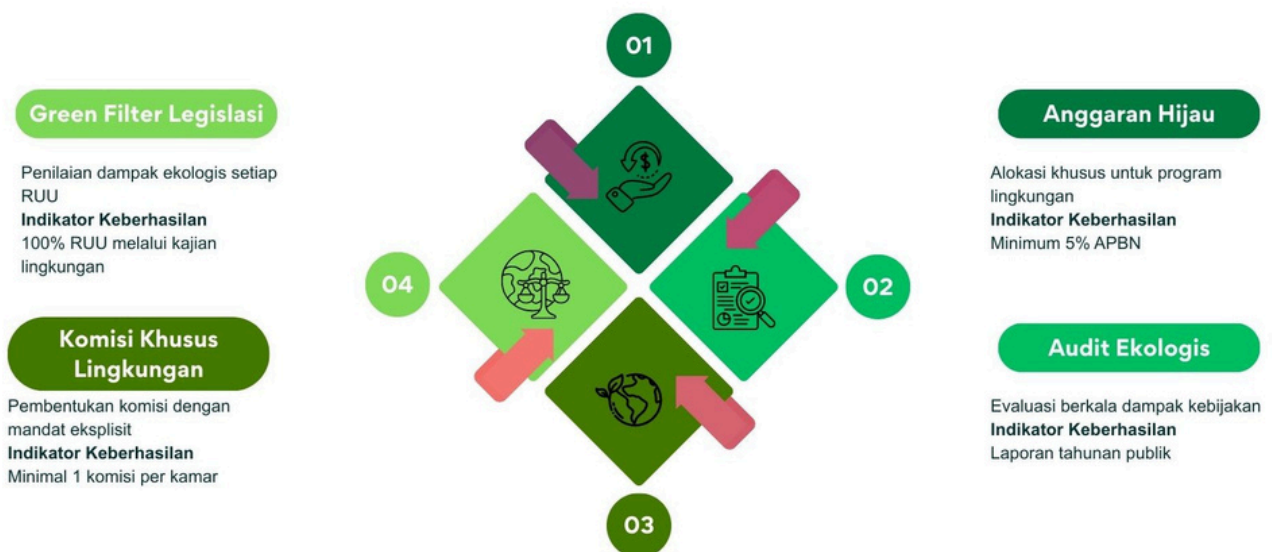
2 GREEN PARLIAMENT: TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Transformasi menuju Green Democracy harus dimulai dari jantung demokrasi perwakilan: parlemen. DPD RI, sebagai representasi daerah, memiliki posisi strategis untuk mengarusutamakan prinsip keberlanjutan dalam fungsi legislasi. Konsep "Green Parliament" mengusulkan setiap Rancangan Undang-Undang harus melewati "green filter"—sebuah mekanisme penilaian dampak ekologis yang sistematis.³

Green filter ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan perubahan mendasar dalam cara parlemen mengevaluasi kebijakan. Setiap RUU akan dinilai berdasarkan: (1) dampak terhadap emisi karbon; (2) pengaruh pada keanekaragaman hayati; (3) implikasi terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal; dan (4) kontribusi terhadap ketahanan iklim. Dengan mekanisme ini, parlemen tidak hanya menjadi pembuat aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam praktik tata kelola yang berkelanjutan.⁴

Parlemen sebagai contoh, bukan sekadar pembuat aturan—inilah esensi Green Parliament. Ketika lembaga legislatif menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional internalnya, dari penggunaan energi hingga pengelolaan sampah, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi lebih kuat dan kredibel.

Framework Green Parliament



3 DPD RI. (2024). Naskah Akademik Green Parliament: Mengarusutamakan Keberlanjutan dalam Legislasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.
4. European Parliament. (2022). Environmental Impact Assessment in EU Legislative Process. Brussels: European Parliament Research Service.

3

GREEN VILLAGE: AKSI DI AKAR RUMPUT

Keberlanjutan ekologi tidak bisa hanya diputuskan di ruang-ruang parlemen Jakarta. Implementasi nyata harus terjadi di tingkat paling dasar: desa. Konsep "Green Village" menawarkan pendekatan bottom-up yang mengakui desa sebagai unit terkecil namun paling krusial dalam tata kelola lingkungan.

Kolaborasi antara DPD RI dan Kementerian Desa untuk menyelenggarakan Lomba Desa Hijau Nasional merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi. Program ini tidak sekadar kompetisi simbolis, melainkan mekanisme untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.⁵

Pemerintah desa yang berhasil menjaga kelestarian hutan, mengelola sampah secara berkelanjutan, atau mengembangkan mata pencaharian ramah lingkungan akan mendapat pengakuan dan dukungan untuk berbagi pengalaman dengan desa-desa lain. Ketahanan ekologi dimulai dari unit terkecil ini—data menunjukkan bahwa 63% wilayah hutan Indonesia berada dalam atau berbatasan langsung dengan wilayah administratif desa, menjadikan pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam upaya pelestarian.⁶

Komponen Green Village



⁵ Climate Action Tracker. (2024). Indonesia Country Assessment. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia>

⁶ CNN Indonesia. (2025, November 11). Jadi Pembicara di COP30, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan Demokrasi Hijau. <https://www.cnnindonesia.com/>

4 DIPLOMASI IKLIM: SUARA INDONESIA DI DUNIA

Indonesia selama ini kerap menjadi objek tekanan internasional dalam isu lingkungan—dikritik karena deforestasi, kebakaran hutan, dan ekspansi perkebunan sawit. Green Democracy menawarkan perubahan paradigma: dari posisi defensif menjadi ofensif, dari objek menjadi subjek yang menawarkan solusi.⁸

Presentasi konsep Green Democracy di COP30 Brazil menjadi momentum strategis untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam gerakan demokrasi hijau global. Lebih dari itu, Indonesia memiliki peluang untuk membangun koalisi parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis—bersama Brazil, Kongo, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya—untuk berbicara dengan satu suara dalam negosiasi iklim internasional.⁹

Koalisi ini penting karena negara-negara pemilik hutan tropis selama ini diperlakukan sebagai pihak yang harus "dikompensasi" untuk tidak merusak hutannya, padahal mereka adalah penyedia jasa ekosistem global yang nilai ekonominya belum pernah diakui secara adil.



⁸ Green Democracy Institute. (2024). Proposal Pendirian dan Program Kerja. Jakarta: GDI.
⁹ Forest Watch Indonesia. (2023). Potret Keadaan Hutan Indonesia 2019-2023. Bogor: FWI.

5 EDUKASI DAN GERAKAN SIPIL

Green Democracy Institute

Transformasi sistemik membutuhkan infrastruktur pengetahuan dan gerakan yang kuat. Lahirnya Green Democracy Institute sebagai organisasi masyarakat sipil merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem pendukung. Institute ini berfungsi sebagai pusat riset, pelatihan, dan advokasi untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi hijau di seluruh level pemerintahan.¹⁰

Kampanye dan Penetapan Hari Khusus

Funwalk Green Democracy dan penetapan 9 November sebagai Green Democracy Day merupakan strategi untuk membangun kesadaran publik yang lebih luas. Perayaan tahunan ini diharapkan menjadi momentum refleksi nasional tentang hubungan antara demokrasi dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus ajang untuk mengukur kemajuan implementasi agenda Green Democracy.¹¹

Peran Kampus

Kampus memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya gagasan progresif dan kepemimpinan ekologis. Program-program studi lingkungan, politik ekologi, dan pembangunan berkelanjutan perlu diperkuat, tidak hanya sebagai disiplin akademis tetapi juga sebagai inkubator gerakan sosial. Mahasiswa harus disiapkan tidak hanya sebagai teknokrat lingkungan, tetapi juga sebagai aktivis dan pemimpin politik yang memahami urgensi krisis ekologi.



**Green
Democracy
Institute**



¹⁰ DJPK Kemenkeu. (2023). Kajian Kapasitas Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

¹¹ Perludem. (2024). Reformasi Pembiayaan Kampanye untuk Demokrasi Berkelanjutan. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

JALAN KE DEPAN: AGENDA AKSI

A. Reformasi Sistem Politik

Menurunkan biaya politik adalah prasyarat fundamental agar kandidat tidak bergantung pada donatur dari sektor eksploitatif. Sistem pembiayaan kampanye yang lebih transparan dan dibatasi, dikombinasikan dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan, akan menciptakan insentif bagi politisi untuk mengadopsi agenda hijau. Mekanisme akuntabilitas ekologis bagi pejabat publik—semacam "green scorecard" yang menjadi pertimbangan pemilih—perlu dikembangkan.¹²

B. Penguatan Kerangka Hukum

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi prioritas legislasi yang mendesak. UU ini harus memperkuat perlindungan masyarakat adat yang selama ini menjadi garda depan pelestarian hutan, serta memberikan perlindungan khusus bagi pulau-pulau kecil yang paling rentan terhadap kenaikan muka air laut. Celah hukum yang selama ini memungkinkan eksploitasi berlebihan harus ditutup.¹³

C. Kolaborasi Multi-Pihak

Tidak ada satu aktor yang bisa menyelesaikan krisis iklim sendirian. Green Democracy harus menjadi platform bersama yang mempertemukan pemerintah, parlemen, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi prosedural, melainkan pembangunan visi bersama dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam implementasi.

D. Investasi pada Generasi Muda

Pendidikan politik ekologis di kampus dan sekolah harus menjadi prioritas. Ruang kepemimpinan bagi anak muda dalam isu lingkungan perlu dibuka lebih lebar. Seperti diungkapkan dalam diskusi Green Democracy: "Generasi muda harus disiapkan menjadi negarawan yang berpikir puluhan tahun ke depan"—bukan politisi yang hanya memikirkan pemilu berikutnya.¹⁴

¹² Perludem. (2024). Reformasi Pembiayaan Kampanye untuk Demokrasi Berkelanjutan. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

¹³ ICEL. (2023). Evaluasi Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia: Gap dan Rekomendasi. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law

¹⁴ Diskusi publik Green Democracy, 9 November 2024, Jakarta. Dikutip dalam JPNN. (2024). Luncurkan Buku Green Democracy, Sultan: Semangat Mewujudkan Keseimbangan dan Persatuan Nasional.

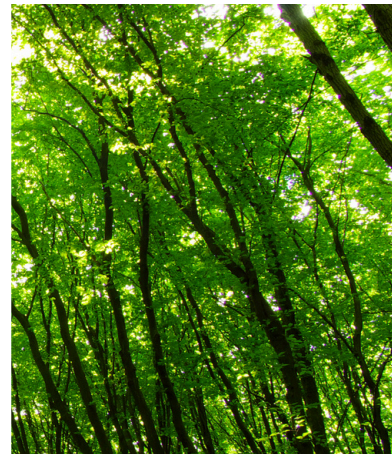
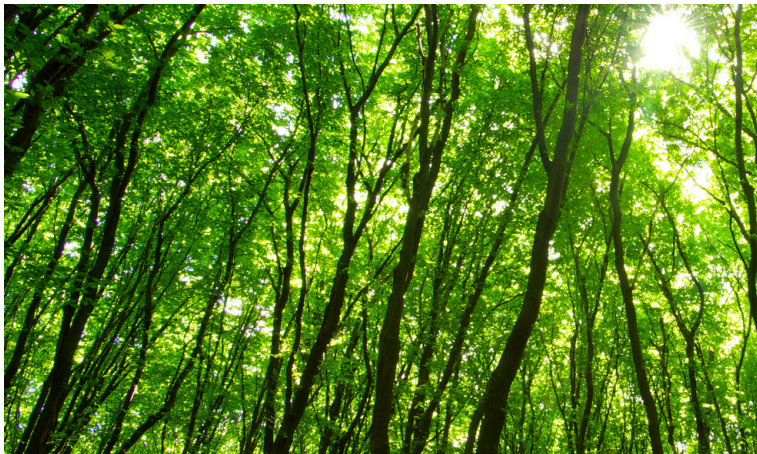
7 PENUTUP: DEMOKRASI YANG LAYAK BAGI BUMI

Kegagalan 70% kebijakan iklim adalah cermin kegagalan demokrasi kita—sistem yang seharusnya mengakomodasi kepentingan jangka panjang rakyat justru terkooptasi oleh kepentingan jangka pendek segelintir elite. Bukan alam yang harus menyesuaikan dengan politik, tetapi politik yang harus menghormati alam. Green Democracy bukan utopia yang tak terjangkau, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

***"KITA TIDAK MEWARISI BUMI DARI NENEK MOYANG, TETAPI
MEMINJAMNYA DARI ANAK CUCU KITA"***
— PIAGAM GLOBAL GREENS

Setiap warga negara memiliki peran: dari pilihan konsumsi sehari-hari hingga pilihan politik di bilik suara. Mendukung pemimpin yang berkomitmen pada keberlanjutan, menjadikan isu lingkungan sebagai kriteria utama dalam setiap pemilu, dan aktif dalam gerakan sosial untuk keberlanjutan—semua ini adalah bentuk partisipasi dalam Green Democracy.

***"DEMOKRASI DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP HARUS SELALU
DALAM SUASANA YANG SEJUK DAN SEIMBANG."***



Daftar Referensi

DPD RI. (2024). Naskah Akademik Green Parliament: Mengarusutamakan Keberlanjutan dalam Legislasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.

European Parliament. (2022). Environmental Impact Assessment in EU Legislative Process. Brussels: European Parliament Research Service.

Kementerian Desa PDTT. (2024). Pedoman Lomba Desa Hijau Nasional 2024. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Badan Informasi Geospasial. (2023). Peta dan Data Kawasan Hutan Indonesia. Jakarta: BIG.

Climate Action Tracker. (2024). Indonesia Country Assessment. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>

CNN Indonesia. (2025, November 11). Jadi Pembicara di COP30, Ketua DPD RI Tawarkan Gagasan Demokrasi Hijau. <https://www.cnnindonesia.com/>

Warta Kota. (2025, November 13). DPD RI Tetapkan 9 November sebagai Hari Green Democracy. <https://wartakota.tribunnews.com/>

Green Democracy Institute. (2024). Proposal Pendirian dan Program Kerja. Jakarta: GDI.

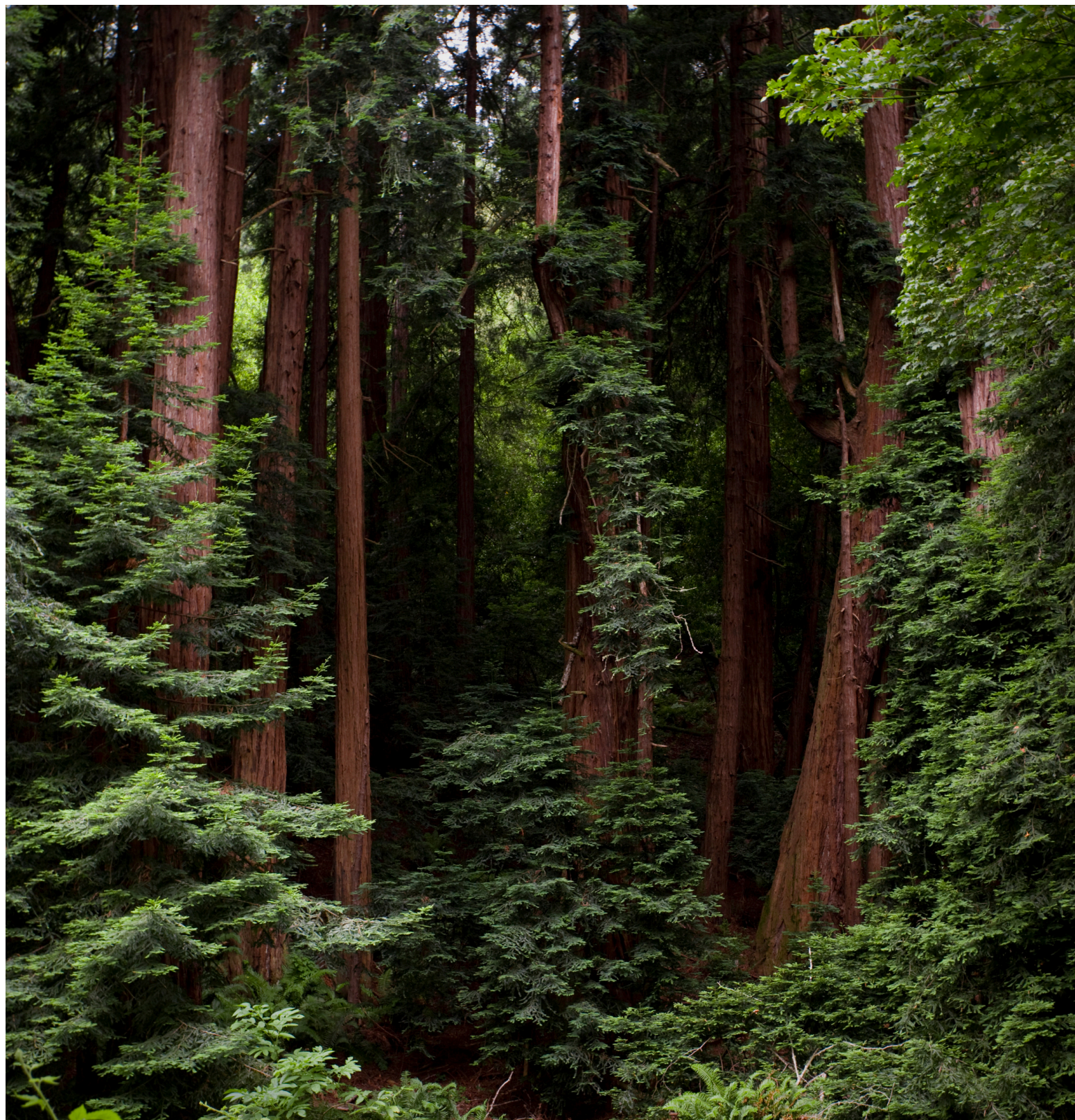
Forest Watch Indonesia. (2023). Potret Keadaan Hutan Indonesia 2019-2023. Bogor: FWI.

DJPK Kemenkeu. (2023). Kajian Kapasitas Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Perludem. (2024). Reformasi Pembiayaan Kampanye untuk Demokrasi Berkelanjutan. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

ICEL. (2023). Evaluasi Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia: Gap dan Rekomendasi. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.

Diskusi publik Green Democracy, 9 November 2024, Jakarta. Dikutip dalam JPNN. (2024). Luncurkan Buku Green Democracy, Sultan: Semangat Mewujudkan Keseimbangan dan Persatuan Nasional.

**Penulis:**

Dr. (c) Bahar Buasan, ST., M.S.M., M.Sc
www.baharbuasan.id

Penerbit:

Kontika Research and Innovation
Jakarta, Indonesia
Tahun Terbit : 2026